

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) ARGO MULYO DI KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH

**Sri Weningsih¹, Darmanto², Siti Aisyah³, Heri Wahyudi⁴, Rani Darojah⁵,
Ridho Harta⁶**

Universitas Terbuka
wening@ecampus.ut.ac.id¹

Abstrak

Kata Kunci:

*Bambu Cendani,
LMDH, hutan
lindung, produksi
bambu*

Permasalahan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Argo Mulyo Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, adalah pengelolaan penanaman bambu cendani para anggota LMDH belum optimal serta belum memadainya alat bantu pengering bambu cendani sehingga berdampak pada kurang optimalnya produksi dan pemasaran bambu cendani. Tujuan kegiatan adalah untuk memberi penyuluhan anggota LMDH Argo Mulyo dalam pengelolaan penanaman bambu cendani dan mengoptimalkan produksi bambu cendani melalui pemberian alat bantu pengolah dan pengering bambu cendani. Kegiatan dilakukan pada anggota LMDH Argo Mulyo Argo Mulyo, Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan dilakukan selama 8 bulan dimulai bulan Maret-Oktober tahun 2022. Tanggapan anggota LMDH pada setiap pelaksanaan kegiatan sangat baik. Pemahaman keorganisasian pengelolaan penanaman bambu cendani meningkat ditandai keberhasilan penambahan kawasan penanaman pohon bambu cendani bertambah 5 hektar. Adapun pemanfaatan alat bantu pengolah dan pengering bambu cendani ditunjukkan dengan keberhasilan penggunaan bambu cendani untuk dipasarkan.

Abstract

Key words:

*Cendani Bamboo,
LMDH, protected
forest, bamboo
production*

The problem of the Argo Mulyo Forest Village Community Institution (LMDH) in Tambi Village, Kejajar District, Wonosobo Regency, is that the management of planting Cendani bamboo by LMDH members is not optimal and there are not enough Cendani bamboo dryers so that it has an impact on the less than optimal production and marketing of Cendani bamboo. The purpose of the activity is to provide counseling for LMDH members Argo Mulyo in the management of Cendani bamboo plantings and to optimize the production of Cendani bamboo through the provision of Cendani bamboo processing tools and bamboo dryers. The activity was carried out on members of LMDH Argo Mulyo Argo Mulyo, Tambi Village, Kejajar District, Wonosobo Regency. The activity was carried out for 8 months starting in March-October 2022. The response from LMDH members on each activity was very good. The organizational understanding of Cendani bamboo planting management increased markedly by the

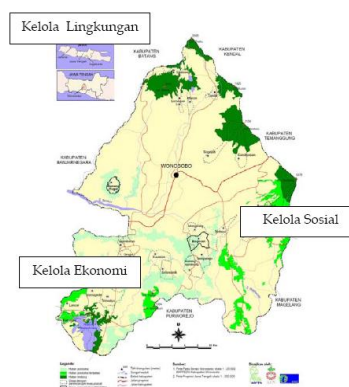
success of adding 5 hectares of Cendani bamboo tree planting area. The use of Cendani bamboo processing aids and dryers is shown by the successful use of Cendani bamboo for marketing.

A. Pendahuluan

Hutan lindung memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya menyangkut tentang kesejahteraan sosial. Hal tersebut tercermin dalam isi dari BAB XIV UUD 1945 tentang Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Untuk menjaga agar kondisi hutan lindung tidak cepat mengalami kerusakan atau deforestasi, diperlukan suatu pengelolaan hutan yang baik antara lain dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan (Arifin, 2001) atau keikutsertaan yang adil dan bijaksana oleh semua pihak yang berkepentingan (Barber, dkk).

Institusi yang berwenang dalam pengelolaan hutan lindung adalah Perum Perhutani (PP. Nomor 72/2010). Perum Perhutani membuat sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sesuai Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009. PHBM merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan multipihak (stakeholder), yaitu antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang terwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), atau Perum Perhutani bersama-sama dengan LMDH dengan stakeholders yang lain. Khusus hutan lindung di Kabupaten Wonosobo dapat terlihat dalam gambar di bawah ini, yang diberi warna hijau.

Gambar 1.
Hutan Lindung di Kabupaten Wonosobo



Sumber: Pemkab Wonosobo, 2006.

Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan prinsip bersama, berdaya dan berbagi dalam hal pemanfaatan lahan, waktu dan hasil dalam pengelolaan

sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial (Khususiyah, dkk., 2009). PHBM dilakukan berbasis Masyarakat Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM dilaksanakan dengan tidak mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah perusahaan Perhutani.

Masyarakat desa hutan (MDH) pada umumnya belum memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup serta memahami pentingnya fungsi hutan dan lingkungannya bagi kehidupan manusia, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung (Sulistyowati, 2004). Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo, yang di dalamnya termasuk aspek pengelolaan hutan lindung, dianggap belum melibatkan partisipasi masyarakat dan belum memprioritaskan pengelolaan kawasan lindung, khususnya Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng. Kebijakan tersebut juga belum mampu mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, menjaga fungsi hidrologik tanah untuk menjamin kesediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan belum tercapai, serta belum memenuhi kecukupan karena belum mampu memecahkan masalah alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan lindung (Andriana, 2007). Selain itu, masyarakat desa hutan melalui LMDH tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan yang dibuat Perhutani tersebut (Ketidakadilan PHBM, 2012). Upaya penyuluhan terhadap penggarap lahan hutan di kawasan hutan lindung dapat dikatakan belum berhasil. Ketidakefisienan dan ketidakefektivan pengelolaan hutan lindung juga ditunjukkan mengenai pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang tidak dapat dijalankan secara efektif karena kurang mendapat dukungan sebagian besar masyarakat pendukung Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Suwito, 2007:16). Padahal menurut Denhardt dan Denhardt (2007) sangat penting melibatkan masyarakat dalam implementasi program, dalam hal ini adalah keterlibatan Masyarakat Desa Hutan dalam rangka implementasi program Perhutani dalam pengelolaan hutan lindung. Keterlibatan masyarakat dapat berdampak positif karena memberikan dorongan untuk aktif berpartisipasi dan meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama yang dilakukan antara masyarakat dengan pihak Perum Perhutani.

Salah satu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dibentuk dalam rangka implementasi kebijakan PHBM Perhutani adalah LMDH “Argo Mulyo”, yang beralamat di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Sebagai pemangku wilayah desa hutan petak 15 RPH Sigedang BKPH Wonosobo. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH “Argo Mulyo” mempunyai program kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), berdasarkan Akta Notaris No. 46 Tanggal 29 Maret 2011.

Terkait dengan potensi yang dimiliki oleh LMDH Argo Mulyo, sekalipun masih ditemui adanya kendala-kendala yang dihadapi LMDH Argomulyo, namun ada hal positif yang dapat diungkapkan. Dilihat dari aspek kelembagaan, organisasi LMDH Argomulyo merupakan suatu organisasi non pemerintah yang resmi dijalankan dan berbadan hukum sesuai dengan pendirian akte notaris No. 46 Tanggal 29 Maret 2011 serta adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perum Perhutani dengan LMDH Argo Mulyo, No. 131 Tanggal 27 Desember 2012. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama tersebut maka kegiatan LMDH sudah diakui keberadaannya serta legal untuk dapat menjalankan aktivitasnya khususnya di kawasan hutan lindung milik Perhutani. Dengan adanya kerjasama tersebut memungkinkan Perum Perhutani memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan kinerja LMDH Argo Mulyo.

Walaupun Ketua LMDH Argo Mulyo yang saat ini dijabat oleh Bapak Romadhon, tadinya hanya lulusan SMP, namun karena Beliau berkeinginan untuk dapat mengelola LMDH Argo Mulyo dengan baik maka dia mempunyai motivasi untuk meningkatkan kemampuan akademiknya dengan cara menempuh Program Paket C dan akhirnya berhasil lulus dengan mendapatkan ijazah SMA. Selain itu dengan ketekunan Romadhon sebagai Ketua LMDH Argo Mulyo, dia berhasil memasukkan cukup banyak anggota masyarakat (sebanyak 90 petani hutan) sebagai anggota dan 20 orang sebagai pengurus. Hal lain yang patut diperhatikan adalah bahwa kehidupan anggota LMDH Argo Mulyo tidak lepas dari bidang kehutanan karena memang tempat tinggalnya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung. Dengan kondisi seperti itu maka budaya dan kehidupan anggota LMDH Argo Mulyo selalu dekat dengan kondisi hutan lindung dan memahami pentingnya fungsi hutan lindung itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan peluang LMDH Argo Mulyo untuk dapat mencapai visi dan misinya maka peluang yang dimiliki oleh LMDH Argo Mulyo cukup menjanjikan. Masyarakat anggota LMDH Argo Mulyo bertempat

tinggal di sekitar kawasan hutan lindung. Dengan kondisi seperti itu maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota LMDH Argo Mulyo tidak mengalami hambatan asalkan penerapannya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Selain bantuan dan dukungan dari Perum Perhutani, maka dukungan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor juga cukup besar. Bentuk bantuan tersebut dapat berupa pelatihan ketrampilan anggota LMDH Argo Mulyo, maupun dukungan dalam bentuk bantuan keuangan dan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan LMDH Argo Mulyo.

Permasalahan yang dihadapi LMDH Argo Mulyo dalam pemanfaatan hutan lindung adalah belum optimalnya kapasitas pengetahuan dan pemahaman anggota LMDH mengenai penanaman Bambu Cendani serta pemrosesan hasil produksi Bambu Cendani dalam rangka pemasaran.

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan tersebut di atas, tim Program Pengabdian kepada Masyarakat Fhisip Universitas Terbuka memberikan alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Anggota LMDH “Argo Mulyo” melalui metode penyuluhan partisipatif

Terkait dengan aspek pemberdayaan anggota, maka kendala yang dihadapi LMDH “Argo Mulyo” adalah sebagian besar anggotanya masih berpendidikan menengah ke bawah dimana masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani buruh lepas dan buruh harian. Kondisi ini menyebabkan hambatan bagi LMDH untuk mengembangkan kapasitasnya dalam rangka menyejahterakan anggotanya, seperti disampaikan oleh Ketua LMDH “Argo Mulyo”:

“Kalau tidak ada pendidikan tidak bisa mengakses, maka LMDH itu saya kira kalau menganut orang-orang tua dulu, ya itu, itu petani caranya bertani masih egois, jadi saya ingin di tahun-tahun mendatang, LMDH bisa mengakses pendidikan juga”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek kualitas sumberdaya manusia masih menjadi kendala dalam menjalankan aktivitas LMDH Argomulyo. Kondisi permasalahan yang menyangkut peran LMDH juga disampaikan oleh Camat Kejajar yang menyatakan bahwa: “Secara umum masalahnya adalah SDM pak, jadi untuk menggerakkan suatu institusi itu kan memang diperlukan suatu SDM.” Salah satu Ketua LSM di Kabupaten Wonosobo menambahkan: “Di tingkat LMDH sendiri, secara kelembagaan LMDH belum kuat semua. Di Wonosobo semua Desa sudah ber LMDH semua, tapi hanya formalitas.” Dalam kaitan dengan kelembagaan,

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi dan peran dari LMDH Argomulyo belum berjalan sesuai yang diharapkan, karena LMDH sebagai suatu organisasi belum dapat menjalankan aktivitasnya sebagai suatu organisasi yang efektif.

2. Pemberian bantuan mesin pengolah Bambu Cendani

Dengan pernyataan tersebut maka penanaman bambu Cendani selain untuk menambah penghasilan anggota LMDH “Argo Mulyo” juga diharapkan membantu kelestarian fungsi hutan lindung, dalam hal ini adalah untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak. Hal lain yang penting adalah bahwa saat ini pasar sangat merespons dengan positif mengenai kehadiran dari tanaman bambu Cendani tersebut yang ditandai dengan banyaknya investor asing yang tertarik dengan tanaman bambu Cendani tersebut atau kedatangan pembeli dari mancanegara. Seperti terlanis dalam media surat kabar:” Aneka hiasan interior rumah dari bahan rotan dan bambu cendani ternyata mampu menarik minat pembeli dari mancanegara.

(<http://www.semarangkab.go.id/utama/berita/kegiatanpemerintahan/>).

Untuk meningkatkan produksi dan pemasaran Bambu Cendani diperlukan dukungan bantuan mesin pengolah Bambu Cendani

B. Metode Pelaksanaan

Metode yang tepat digunakan untuk meningkatkan ketrampilan pengurus dan anggota LMDH “Argo Mulyo” dalam melakukan penanaman bambu Cendani adalah melalui pemberian ilmu pengetahuan dan praktek penanaman pohon bambu Cendani, serta pengolahan tanaman Bambu Cendani melalui:

1. Pemberian penyuluhan partisipasif mengenai kelembagaan oleh Tim Dosen FISIP UT.
2. Pemberian penyuluhan mengenai aspek penanaman tanaman bambu Cendani dan pengolahan produksi Tanaman Bambu Cendani, oleh Ketua LMDH Argo Mulyo, sekaligus Nara Sumber Bambu Cendani, Bpk. Romadhon.

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Awal Kegiatan untuk merealisasikan kegiatan tersebut yaitu

1. Tahap Awal
 - Melakukan survey awal lokasi lahan penanaman bambu Cendani.

- Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Pengurus LMDH “Argo Mulyo” untuk mengetahui teknis kegiatan penyuluhan kepada anggota LMDH “Argo Mulyo” dan penanaman bambu Cendani serta pengolahan produksi Bambu Cendani.
2. Tahap Pelaksanaan
 - Penyampaian Penyuluhan Keorganisasian kepada anggota LMDH “Argo Mulyo” termasuk diskusi secara intensif.
 - 2. Penyampaian Penyuluhan Penanaman Tanaman kepada anggota LMDH “Argo Mulyo” serta pengolahan produksi Bambu Cendani.
 3. Tahap Monitoring
 - Melakukan kunjungan ke Kantor LMDH “Argo Mulyo” dalam rangka mengevaluasi hasil penyuluhan, berbentuk kegiatan diskusi dan ramah tamah.
 - Melakukan survey lapangan untuk mengetahui efektivitas pengolahan produksi tanaman bambu Cendani.

D. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan abdimas ini dilakukan pada bulan April hingga Oktober 2022 di Kantor LMDH Argo Mulyo, Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Kegiatan diawali dengan kunjungan awal untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berjalan lancar pada bulan Oktober 2022 dengan Ketua LMDH Argo Mulyo Bpk. Romadhon dan staf produksi Bambu Cendani.

Gambar 2.

Kunjungan Survey ke Kantor LMDH Argo Mulyo dan hutan Bambu Cendani, Wonosobo



Dari diskusi dengan Ketua LMDH Argo Mulyo dan Staf Produksi, diperoleh kepastian dan pemahaman terkait dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim Dosen FHISIP-UT. Diskusi tersebut menyangkut pentingnya pemahaman pengelolaan penanaman Bambu Cendani dapat

diberikan melalui penyuluhan kelembagaan. Kelembagaan merupakan salah aspek penting dalam pemberdayaan anggota LMDH Argo Mulyo. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pentingnya ketrampilan anggota LMDH dalam penggunaan alat pengolah dan pengering Bambu Cendani sehingga kualitas Bambu Cendani menjadi optimal untuk dipasarkan. Ketrampilan yang diperoleh anggota LMDH Argo Mulyo tersebut perlu didukung dengan ketersediaan mesin pengolah dan pengering Bambu Cendani karena semakin lengkap mesin pengolah dan pengering Bambu Cendani yang dimiliki LMDH Argo Mulyo dan didukung dengan ketrampilan dalam penggunaan mesin pengolah dan pengering Bambu Cendani tersebut dapat menghasilkan Bambu Cendani yang berkualitas.

Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi keorganisasian menyangkut LMDH sehingga diharapkan para anggota LMDH memiliki pemahaman terkait tugas dan fungsi organisasi sehingga LMDH dapat lebih optimal dalam mengelola hutan Bambu Cendani termasuk prospek pemasarannya.

Gambar 3.

Penyuluhan keorganisasian dalam pengelolaan hutan Bambu Cendani



Selanjutnya dilakukan praktek pengolahan produksi hasil hutan Bambu Cendani dengan menggunakan mesin pengolah dan pengering bambu sehingga kualitas hasil produksi bambu cendani dapat optimal dalam rangka pemasaran.

Gambar 4.

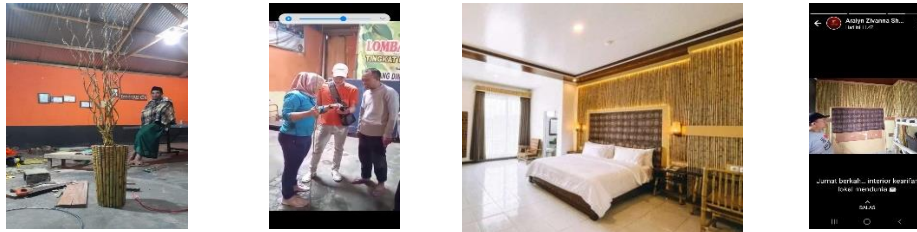
Penyuluhan keorganisasian dalam pengelolaan hutan Bambu Cendani



Dari proses pengolahan serta pengeringan hasil Bambu Cendani maka dihasilkan produk yang siap dipasarkan. Produk yang dihasilkan seperti tertera di gambar di bawah ini.

Gambar 5.

Hasil produksi Bambu Cendani dan rencana pemasarannya



E. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diuraikan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sebagai berikut.

1. Semua anggota LMDH Argo Mulyo Desa Tambi, Kabupaten Wonosobo yang menjadi peserta pelatihan antusias dan memiliki komitmen yang baik untuk mengikuti semua program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan tim pelaksana.
2. Terjadi peningkatan pemahaman terhadap penyelenggaraan keorganisasian LMDH sehingga anggota LMDH memahami peran organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan LMDH
3. Terjadi peningkatan produksi dengan penambahan bantuan mesin pengolah dan pengering hasil tanaman bambu sehingga pemasaran produksi hasil bambu cendani meningkat.

F. Saran

Perlu bantuan dana yang berkelanjutan dalam bentuk mesin atau alat pengolah produksi hasil Bambu Cendani sehingga produksi Bambu Cendani serta hasil olahannya dapat maksimal untuk meningkatkan pendapatan ekonomi anggota LMDH Argo Mulyo.

G. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka yang memberikan sudah memfasilitasi dan memberikan dana pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga bantuan dana tersebut bermanfaat untuk peningkatan pemberdayaan anggota LMDH Argo Mulyo

yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan anggota LMDH Argo Mulyo.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua LMDH Argo Mulyo Bapak Romadhon sebagai Ketua LMDH yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman anggotanya sehingga kapasitas sumberdaya anggota LMDH Argo Mulyo dapat meningkat.

H. Daftar Pustaka

- Andriana, Reni. (2007). Evaluasi Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo. Universitas Diponegoro:Tesis.
- Arifin, Bustanul. (2001). *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika, dan Praksis Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Barber, dkk.(n.d). *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt. Robert B. (2007). *The new public service: serving, not steering* . New York:M.E. Sharpe
- Ketidakadilan PHBM. (2012). <http://arupa.or.id/ketidakadilan-phbm/>. Diunduh 9 Nopember 2013.
- Khususiyah, dkk. (2009). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) : Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan & Pemerataan Pendapatan Petani Miskin di Sekitar Hutan. World Agroforestry Centre – ICRAF. Brief No. 02, Policy Analysis Unit
- Sulistiyowati, Budi. (2004). Perambahan Kawasan Hutan Lindung. Suatu Studi Kasus di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo. Tesis: Universitas Indonesia
- Suwito. (2007). *Working Group on Forest Land Tenure*. Warta Tenure Nomor 4 www.wg-tenure.org

PERATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat



(<http://www.semarangkab.go.id/utama/berita/kegiatan-pemerintahan/>)
diunduh tg. 8 Februari 2016